

CASCADINNG KINERJA
CASCADING KINERJA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2026

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	TARGET KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
					2026	2027	2028	2029	2030				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[12]
Meningkatnya pemerataan infrastruktur konektivitas yang berkualitas	Meningkatnya pemerataan infrastruktur konektivitas yang berkualitas INDIKATOR : 1). Waktu Tempuh Jalan Provinsi (km/jam) 2). V/C Rasio Jalan 3).Rata-Rata Load Factor Penumpang Angkutan Umum	Meningkatnya Kemantapan jalan Provinsi (CROSS CUTTING) Indikator (1). Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (%) (2). Persentase Jembatan Dengan Kondisi Mantap (%)											
	Meningkatnya pemerataan infrastruktur konektivitas yang berkualitas	Meningkatnya pemerataan infrastruktur konektivitas yang berkualitas	1). V/C Rasio Jalan	Rasio	0,388	0,385	0,383	0,382	0,381	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ),	1. Konektivitas Darat 2. Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhdap Kondisi Ideal	1. 61% 2. 52%	Kepala Bidang Lalu Lintas
			2). Rata-Rata Load Factor Penumpang Angkutan Umum	%	71.5	72	72.5	73	73.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ),	1. Konektivitas Darat 2. Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhdap Kondisi Ideal	1. 61% 2. 52%	Kepala Bidang Angkutan Jalan, Kepala UPTD Terminal
										PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Konektivitas Laut	32%	Kepala Bidang Pelayaran, Kepala UPTD PASDPL, Kepala UPTD TAA
										PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang ditangani	81%	Kepala Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan
		Meningkatnya Layanan Transportasi	3). Rasio Konektivitas Transportasi	Rasio	0.66	0,685	0,70	0,735	0.76	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ),	1. Konektivitas Darat 2. Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhdap Kondisi Ideal	1. 61% 2. 52%	Kepala Bidang Angkutan
										PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Konektivitas Laut	32%	Kepala Bidang Pelayaran
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubun	4). Nilai SAKIP	Nilai	82	82.5	83	83.5	84	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	Sekretaris
	1. Rasio Konektivitas Transportasi	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Provinsi	Tingkat Keselamatan Transportasi Provinsi	%	100	100	100	100	100	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			Kepala Bidang Lalu Lintas
	2). V/C Rasio Jalan									Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Jumlah perlengkapan jalan di jalan Provinsi yang terpasang	45%	Kepala Seksi Keselamatan Lalu Lintas Jalan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	TARGET KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
					2026	2027	2028	2029	2030				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[12]
3).Rata-Rata Load Factor Penumpang Angkutan Umum										Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	6 Unit	Penanggung Jawab : Kepala Seksi Keselamatan Jalan Pelaksana : Staf Seksi Keselamatan Jalan
										Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Terminal yang dilakukan Pemantauan	79%	Kepala Seksi Operasional UPTD Pengelolaan Terminal
										Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	7 Terminal	Penanggung Jawab : Kepala Seksi Operasional UPTD Pengelolaan Terminal Pelaksana : Staf Seksi Operasional UPTD Pengelolaan Terminal
										Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Persentase Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	69%	Kepala Seksi Keselamatan Lalu Lintas Jalan
										Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	1 Dokumen	Penanggung Jawab : Kepala Seksi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Pelaksana : Staf Seksi Keselamatan Lalu Lintas Jalan
										Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Persentase terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan provinsi	51%	Kepala Seksi manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas jalan
										Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Dokumen	Penanggung jawab : Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas jalan Pelaksana : Staf Seksi manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas jalan
										Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1 Laporan	Penanggung jawab : Kepala Seksi Pengendalian Operasional Lalulintas jalan Pelaksana Seksi Pengendalian Operasioanl Lalulintas Jalan
										Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan	Penanggung Jawab : Kepala Seksi manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas jalan Pelaksana : Seksi manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan
										Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi yang terlaksana	Persentase Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi yang terlaksana	37%	Kepala Seksi manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas jalan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	TARGET KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
					2026	2027	2028	2029	2030				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[12]
										Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang terawasi	1 Laporan	Penanggung jawab : Kepala Seksi manajemen dan Rekaysa Lalu Lintas Jalan Pelaksana : Staf Seksi manajemen dan Rekayasa Lalu lintas jalan
										PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang ditangani	81%	Kepala Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan
										Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase dokumen Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang tersedia	42%	Kepala Seksi Lalu lintas dan angkutan perkeretaapian
										Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Kewenangan Provinsi	200 Orang	Penanggung jawab : Kepala Seksi lalu lintas dan angkutan perkeretaapian Pelaksana : Staf Seksi Lalu Lintas dan angkutan perkeretaapian
										Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan jalur Perkeretaapian Provinsi	Persentase Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi yang ditetapkan	24%	Kepala Seksi Lalu lintas dan angkutan perkeretaapian
										Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	300 Orang	Penanggung jawab : Kepala Seksi lalu lintas dan angkutan perkeretaapian Pelaksana : Staf Seksi Lalu Lintas dan angkutan perkeretaapian
										Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang ditetapkan	28%	Kepala Seksi lingkungan perhubungan
										Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	Penanggung jawab : Kepala Seksi lingkungan perhubungan Pelaksana : Staf Seksi lingkungan perhubungan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	TARGET KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
					2026	2027	2028	2029	2030				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[12]
		Meningkatnya Layanan Transportasi Indikator : Rasio Konektivitas Transportasi		Rasio	0,660	0,685	0,70	0,735	0.76	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			Kepala Bidang Lalu Lintas
										Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Persentase Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	69%	Kepala Bidang Angkutan Jalan
										Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1 Dokumen	Penanggung Jawab : Kepala Seksi Pemadu Moda dan Teknologi Perhubungan Pelaksana : Staf Seksi Pemadu Moda dan Teknologi Perhubungan
										Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	79%	Kepala Bidang Angkutan Jalan
										Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	1 Dokumen	Penanggung Jawab : Kepala Seksi Angkutan Orang Pelaksana : Staf Seksi Angkutan Orang
										Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	6 Unit	Penanggung Jawab : Kepala Seksi Angkutan Orang Pelaksana : Staf Seksi Angkutan Orang
										Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek yang diterbitkan	67%	Kepala Bidang Angkutan Jalan
										Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	25 Unit	Penanggung Jawab : Kepala Seksi Angkutan Orang Pelaksana : Staf Seksi Angkutan Orang
										Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	umlah terminal tipe B yang dikelola	7 Terminal	Kepala UPTD Terminal
										Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	JumlahTerminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	7 Unit	Penanggung Jawab : Kasubag TU UPTD Terminal Pelaksana : Staf Subag TU UPTD Terminal

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	TARGET KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
					2026	2027	2028	2029	2030				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[12]
										Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	7 Unit	Penanggung Jawab : Kepala Seksi Sarana dan Prasarana UPTD Terminal Pelaksana : Staf Seksi Sarana dan Prasarana UPTD Terminal
										PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Konektivitas Laut	32%	Kepala Bidang Pelayaran
										Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten / Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Persentase Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan yang terlaksana	67%	Kepala Seksi Angkutan pelayaran rakyat dan ASDP
										Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan	Penanggung Jawab : Kepala Seksi Angkutan pelayaran rakyat dan ASDP Pelaksana : StafSeksi Angkutan pelayaran rakyat dan ASDP
										Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Lintasan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah yang ditetapkan	1 Lintasan	Kepala Seksi Angkutan pelayaran rakyat dan ASDP
										Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten / Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten / Kota dalam Daerah Provinsi	1 Kali	Penanggung Jawab : Kepala Seksi Angkutan pelayaran rakyat dan ASDP Pelaksana : StafSeksi Angkutan pelayaran rakyat dan ASDP
										Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang melayani Trayek antar Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang melayani trayek antar Daerah Kabupaten / kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	Penangung Jawab : Kepala Seksi Operasional UPTD PASDPL Pelaksana : Staf Seksi Operasional UPTD PASDPL
										PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Konektivitas Laut	32%	Kepala Bidang Pelayaran

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	TARGET KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
					2026	2027	2028	2029	2030				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[12]
										Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang Jasa Pengurusan Transportasi, angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Persentase Jumlah Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas yang diterbitkan	68%	Kepala Seksi Badan Usaha dan Jasa Pelayaran
										Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha JasaTerkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	Penanggung Jawab : Kepala Seksi Badan Usaha dan Jasa Pelayaran Pelaksana : Staf Seksi Badan Usaja dan jasa Pelayaran
										Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang diterbitkan izin dan beroperasi	1 Pelabuhan	Kepala Seksi Kepelabuhan
										Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	1 Pelabuhan	Penanggung Jawab : Kepala Seksi kepelabuhan Pelaksana : Staf Seksi Kepelabuhan
		Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah Indikator : Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah		%	100%	100%	100%	100%	100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	Sekretaris
										Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	79%	Kasubag Perencanaan
										Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Penanggung Jawab : Kasubag Perencanaan Pelaksana : Staf Perencanaan
										Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Penanggung Jawab : Kasubag Perencanaan Pelaksana : Staf Perencanaan
										Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Penanggung Jawab : Kasubag Perencanaan Pelaksana : Staf Perencanaan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	TARGET KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
					2026	2027	2028	2029	2030				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[12]
										Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Penanggung Jawab : Kasubag Perencanaan Pelaksana : Staf Perencanaan
										Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Penanggung Jawab : Kasubag Perencanaan Pelaksana : Staf Perencanaan
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	Penanggung Jawab : Kasubag Perencanaan Pelaksana : Staf Perencanaan
										Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	Penanggung Jawab : Kasubag Perencanaan Pelaksana : Staf Perencanaan
										PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	Sekretaris
										Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen keuangan yang tersusun	89%	Kasubag Keuangan
										Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	139 ASN	Bendahara
										Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Penanggung Jawab : Kasubbag Keuangan Pelaksana : Staf Subbag Keuangan
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	Penanggung Jawab : Kasubbag Keuangan Pelaksana : Staf Subbag Keuangan
										Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Penanggung Jawab : Kasubag Perencanaan Pelaksana : Staf Subbag Perencanaan
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Dokumen	Penanggung Jawab : Kasubag Perencanaan Pelaksana : Staf Subbag Perencanaan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	TARGET KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
					2026	2027	2028	2029	2030				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[12]
										Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Penanggung Jawab : Kasubag Perencanaan Pelaksana : Staf Subbag Perencanaan
										Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan kepegawaian yang terlaksana	84%	Kasubag Umum & Kepegawaian
										Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 ASN	Penanggung Jawab : Kasubag Umum & Kepegawaian Pelaksana : Staf Umum & Kepegawaian
										Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	Penanggung Jawab Kepala Seksi Dampak Lalu Lintas Pelaksana : Staf Seksi Dampak Lalu Lintas
										Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayananan asministrasi umum yang terlaksana	89%	Kasubag Umum & Kepegawaian
										Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Penanggung Jawab : Kasubag Umum & Kepegawaian Pelaksana : Staf Umum & Kepegawaian
										Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Dokumen	Penanggung Jawab : Kasubag Umum & Kepegawaian Pelaksana : Staf Umum & Kepegawaian
										Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket	Penanggung Jawab : Kasubag Umum & Kepegawaian Pelaksana : Staf Umum & Kepegawaian
										Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Penanggung Jawab : Kasubag Keuangan Pelaksana : Staf Subbag Keuangan
										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Penanggung Jawab : Kasubag Keuangan Pelaksana : Staf Subbag Keuangan
										Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Penanggung Jawab : Kasubag Umum & Kepegawaian Pelaksana : Staf Umum & Kepegawaian
										Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Kantor yang terlaksana	86%	Kasubag Umum & Kepegawaian
										Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Penanggung Jawab : Kasubag Umum & Kepegawaian Pelaksana : Staf Umum & Kepegawaian

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	TARGET KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
					2026	2027	2028	2029	2030				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[12]
										Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Bendahara
										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Penanggung Jawab : Kasubag Umum & Kepegawaian Pelaksana : Staf Umum & Kepegawaian
										PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	Sekretaris
										Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penataan BMD yang terlaksana	87%	Kasubag Umum & Kepegawaian
										Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Penanggung Jawab : Kasubag Umum & Kepegawaian Pelaksana : Staf Umum & Kepegawaian
										Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Penanggung Jawab : Kasubag Umum & Kepegawaian Pelaksana : Staf Umum & Kepegawaian
										Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang terpelihara	82%	Kasubag Umum & Kepegawaian
										Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 R4	Penanggung Jawab : Kasubag Umum & Kepegawaian Pelaksana : Staf Umum & Kepegawaian
										Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 R2 R4	Penanggung Jawab : Kasubag Umum & Kepegawaian Pelaksana : Staf Umum & Kepegawaian
										Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Penanggung Jawab : Kepala Seksi Oprasional Pelabuhan & Kepala Seksi Operasional kereta Api Indralaya
										Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	Penanggung Jawab : Kasubag Umum & Kepegawaian Pelaksana : Staf Umum & Kepegawaian
										Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2 Gedung	Penanggung Jawab : Kasubag Umum & Kepegawaian Pelaksana : Staf Umum & Kepegawaian

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	TARGET KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
					2026	2027	2028	2029	2030				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[12]
										Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	412 Unit	Penanggung Jawab : Kasubag Umum & Kepegawaian Pelaksana : Staf Umum & Kepegawaian
										Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	79%	Kepala UPTD TAA
										Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Seluruh Kepala Seksi UPTD TAA

Palembang, 9 Februari 2026
Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Sumatera Selatan



Musni Wijaya, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196906081990091001